



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUWARNO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **461114**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 743 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 702 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah Seluas 396 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
10. Tanah Seluas 547 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	12.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	12.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	177.081.993
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.989.081.993
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.989.081.993

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.